



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SRI SULASTRI
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
3. NHK : 243738

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/500 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 1125 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/45 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 412.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 16.400.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.053.400.000**III. HUTANG** Rp. 503.325.693**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.550.074.307

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.